KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Minyak gratis dari UEA, peluang perkuat ketahanan energi
Tanggal : Sabtu, 31 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Minyak Gratis Dari UEA

Peluang Perkuat Ketahanan Energi



FOTO: FB PRIBADI

Rivqy Abdul Halim

SENAYAN menyambut baik rencana Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) menyalurkan bantuan sebanyak 30 juta barel minyak mentah secara gratis kepada Indonesia. Bantuan tersebut diharapkan punya kejelasan skema, persyaratan, serta kepentingan yang menyertainya.

Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim mengatakan, bantuan energi di tengah dinamika geopolitik dan ketidakpastian harga minyak dunia tentu menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, Pemerintah perlu memastikan setiap kerja sama internasional tetap berlandaskan kepentingan nasional dan tidak menimbulkan konsekuensi yang merugikan di kemudian hari.

"Kita perlu memastikan apa tujuan, mekanisme, dan konsekuensi dari bantuan tersebut. Jangan sampai sesuatu yang terlihat gratis justru menyimpan kewajiban atau kepentingan yang belum kita perhitungkan," ujar Rivqy di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Sebelumnya, Indonesia berpotensi mendapatkan pasokan minyak mentah hingga 30 juta barel dari Pemerintah UEA tanpa biaya pengiriman dan modal kerja. Komitmen tersebut disampaikan Duta Besar UEA saat bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Rivqy melanjutkan, prinsip kehati-hatian bukan berarti menolak bantuan, melainkan memastikan setiap manfaat yang ditawarkan benar-benar nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu memeriksa aspek legalitas, kualitas minyak, skema pengiriman, kapasitas pengolahan di dalam negeri, hingga transparansi pemanfaatannya. "Semua perlu jelas sejak awal, transparan, dan tidak mengurangi kedaulatan kita dalam menentukan kebijakan energi," kata politisi PKB ini.

Selain itu, ia meminta Pemerintah menghitung secara terbuka dampak bantuan tersebut terhadap kebutuhan impor minyak, biaya pengadaan energi, beban subsidi dan kompensasi energi, serta kondisi keuangan negara. Dengan begitu, manfaat ekonomi yang diperoleh dapat diukur secara konkret, bukan sekadar menjadi kabar baik di atas kertas.

Apabila bantuan 30 juta barel minyak mentah tersebut benar-benar terealisasi, Rivqy berharap, Pemerintah mempertimbangkan pemanfaatan sebagian manfaat ekonominya untuk meringankan beban masyarakat, termasuk melalui evaluasi kemungkinan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional.

Bila bantuan ini benar-benar mengurangi biaya pengadaan minyak, manfaatnya jangan berhenti di neraca Pemerintah atau perusahaan energi. "Perlu dihitung apakah ada ruang untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi negara. Masyarakat mesti ikut merasakan manfaatnya," tegas legislator asal Jawa Timur (Jatim) ini. ■ TIF